

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tarmidzi Taher dalam sebuah komentarnya pernah mengatakan bahwa Mohammad Natsir adalah salah satu diantara sedikit manusia Indonesia yang multi dimensional dan sangat kompleks. Ia adalah seorang pemikir dan pembaharu pemikiran dan pengamalan Islam.

Mohammad Natsir hidup pada saat terjadi pergolakan politik di Indonesia, suatu kondisi awal kemerdekaan dimana terjadi pertentangan-pertentangan ideologi yang disebabkan oleh berbagai kepentingan politis yang masing-masing mencari pengaruh dan penentu bagi masa depan bangsa Indonesia. Sebagai seorang muslim sejati tentu saja Natsir memilih Islam sebagai konstitusi Ideologi yang diperjuangkan. Karena keteguhannya memegang keyakinan tidak jarang Natsir terlibat dalam polemik politis dengan tokoh-tokoh seideologi maupun dengan lawan-lawan politiknya.

Natsir lahir di Alahanpanjang Minangkabau pada tanggal 17 Juli 1908 dan wafat di Jakarta pada 6 Pebruari 1993. Secara formal ia mengenyam pendidikan barat di sekolah-sekolah Belanda. Pendidikan terakhir beliau adalah *Algemeen*

Middelbare School (AMS) di Bandung dalam bidang kesusasteraan barat klasik. Natsir sebenarnya mempunyai kesempatan untuk meneruskan pendidikannya ke Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta, atau bahkan Fakultas Ekonomi di Rotterdam Belanda dengan beasiswa pemerintah, namun ia menolak kesempatan itu dan memilih untuk meneruskan kajian keagamaannya dengan Ustadz A. Hassan, seorang Ulama berhaluan radikal dan menjadi tokoh utama Organisasi Sosial Keagamaan Persatuan Islam. (Ensiklopedi Islam IV, 1994 : 21)

Natsir memulai perjuangannya dengan masuk menjadi anggota Jong Islamieten Bond (JIB) dan menjadi ketuanya pada tahun 1928-1932. Organisasi ini mayoritas anggotanya adalah pelajar-pelajar bumiputera yang bersekolah di sekolah-sekolah Belanda, dan banyak mendapat pengaruh intelektual dari H. Agus Salim, seorang tokoh intelektual muslim Indonesia dan pemimpin Sarekat Islam, kemudian juga aktif di Partai Islam Indonesia (PII) dan Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI), suatu badan federasi organisasi sosial dan politik Islam yang didirikan menjelang akhir penjajahan Belanda di Indonesia. Ia merupakan perintis berdirinya Masyumi sekaligus ikut membesarkan partai politik ini hingga menjadi partai terbesar di Indonesia dan menjadi ketua DPP Masyumi pada tahun 1949 - 1958. Puncak karir politik ia capai ketika berhasil menjadi Perdana Menteri pada tahun 1950-1951 sebagai konsekuensi logis dari kedudukannya sebagai Ketua Masyumi.

Ia dikenal di dunia internasional sebagai seorang yang selalu mendukung pergerakan-pergerakan kemerdekaan bangsa-bangsa Muslim di Asia Afrika dan

berusaha menghimpun negara-negara tersebut dalam hubungan kerja sama yang menguntungkan semua pihak. Karena jasa-jasanya itu Dr. Inamullah Khan menyebutkan sebagai salah satu diantara tokoh-tokoh besar dunia internasional abad ini.

Natsir juga pernah menjadi Wakil Presiden World Islamic Congress yang bermarkas di Karachi Pakistan dan anggota pendiri Rabithah Al Alam Al Islami yang berpusat di Saudi Arabia. Dalam organisasi-organisasi inilah ia bertemu dengan para pejuang Islam semasanya, seperti Hasan Al Banna, Sayyid Qutb, dan Abul A'la Al Maududi. Hanya saja yang perlu dicatat disini bahwa sekalipun ia hidup semasa dengan para tokoh politik ini dan bersama-sama memperjuangkan Islam sebagai *main idea*, mereka mempunyai corak pemikiran yang berbeda. Perbedaan ini kemudian memisahkan mereka dalam dua kategori pemikiran, modernisme dan tradisioanalisme. Natsir mewakili modernisme, sedang tiga tokoh yang disebut terakhir mewakili fundamentalisme. ✓

Perbedaan itu sendiri, sebenarnya merupakan suatu hal yang wajar terjadi, sebab kondisi sosial yang meliputi masing-masing tokoh ini memang berbeda, disamping memang secara tinjauan doktrinal, Islam tidak memberi gambaran tegas mengenai bentuk nyata sistem pemerintahan negara. ✓

Keterlibatan Natsir dalam memimpin sebuah partai politik terbesar di Indonesia dan berkali-kali terlibat dalam memegang kekuasaan politik, menurut Yusril menyebabkan ia harus dilihat dalam perspektif yang berbeda dengan beberapa tokoh pemikir Islam terkemuka saat itu. (Yusril, 1995 : 125) ✓

Keterlibatan seorang tokoh politik dalam sistem kekuasaan memang akan sangat mempengaruhi sepak terjang tokoh bersangkutan, sebab disamping ia harus berfikir dalam perspektif ideologis yang dipegangnya, ia harus juga berfikir pada kepentingan rival-rival politiknya, sehingga gejala yang mungkin timbul dari perbedaan pandangan masing-masing aktor politik dapat ditekan sekecil mungkin, karena mereka telah merasa terwakili oleh sistem yang telah ada. Masalah ini tampaknya juga melilit Natsir. Heterogenitas partai politik yang tumbuh pada masanya mengharuskannya untuk berfikir komprehensif dan memandang segala sesuatunya dari berbagai sudut kepentingan. Inilah barangkali yang menyebabkan, menurut sebagian pengamat Natsir cenderung kompromistis dan selalu terbuka untuk berpolemik dengan siapa saja.

Mengenai perbedaan karakteristik pemikiran antara Natsir dan Maududi Yuril Ihza mengatakan bahwa Natsir dan Maududi adalah dua tokoh seaman yang sama-sama dikenal luas di dunia Islam. Tetapi kedua-duanya lahir dan hidup dalam suasana perkitaran sosial politik yang berbeda. Perbedaan tersebut nantinya akan memberi nuansa-nuansa yang berbeda pula dalam pola berfikir diantara keduanya.

Natsir lahir di Indonesia dan bergerak dalam konteks Indonesia. Maududi (1903-1979) lahir di India dan kemudian hijrah ke Pakistan. Konteks sosial budaya yang berbeda antara Indonesia di satu pihak dengan India dan Pakistan di lain pihak memberi pengaruh cukup besar dalam pembentukan corak pemikiran Maududi dan Natsir. Disamping itu latar belakang pendidikan mereka juga berbeda, Natsir

menempuh pendidikan barat namun mempelajari Islam dengan sungguh-sungguh, sedangkan Maududi sepenuhnya menempuh pendidikan tradisional Islam namun cukup luas menelaah literatur-literatur barat secara otodidak. Kedua-duanya sama-sama aktif dalam pergerakan Islam. Natsir tampil menjadi ketua Masyumi, partai Islam terbesar di Indonesia, dan juga di dunia pada zamannya. Maududi menjadi ketua Jamaat Islami, partai Islam bercorak elit dan beranggota relatif sedikit (tahun 1958 anggota partai ini 1.258 orang). Masyumi pernah memegang kekuasaan politik di Indonesia sebaliknya Jamaat Islami selamanya menjadi partai marjinal baik di Pakistan maupun di India. Dalam kancah politik praktis Maududi tidak pernah memegang jabatan politik formal, dan partainya lebih banyak memainkan peranan sebagai kelompok oposan dan kelompok penekan dalam sejarah politik Pakistan. Sebaliknya Natsir pernah memegang jabatan-jabatan politik formal dalam pemerintahan Indonesia saat itu, yaitu sebagai Menteri penerangan pada dua periode kabinet dan menjadi Perdana Menteri pada tahun 1950-1951.

Selanjutnya Yusril mengatakan :

“Kasus Natsir dan Maududi agaknya relevan untuk menunjukkan bagaimana dinamika doktrin Islam ke dalam realitas sosial politik dalam dua masyarakat yang berbeda. Dinamika itu sekaligus menunjukkan bagaimana Islam yang ditampilkan dalam bentuk ideologi dan perilaku politik dapat menimbulkan nuansa-nuansa yang berbeda, karena adanya faktor-faktor tertentu yang mendorong terjadinya perbedaan itu.” (Yusril, 1995 : 65)

Karakteristik utama lain dari pemikiran Natsir adalah persepsinya tentang keluwesan doktrin Islam. Menurut Natsir, sebagai agama manusia Islam harus

senantiasa bisa diterima dan menjadi pedoman kapan saja dan dimana saja. Suatu ketika ia menyitir kata-kata H.A.R. Gibb : “ Islam is indeed much more than a system of theology, it is a complete civilization.” Pemikiran Natsir yang demikian ini dipengaruhi oleh persepsinya tentang lembaga ijtihad.

Menurut Natsir ijtihad harus memperhatikan keadaan tempat dan masanya. Ia setuju dengan apa yang dikatakan Mohammad Iqbal bahwa ijtihad merupakan prinsip gerak di dalam struktur Islam, yakni usaha secara optimal untuk memahami asas-asas umum di dalam al Qur'an dan sunnah nabi dan menerapkannya untuk menyelesaikan berbagai masalah aktual di dalam masyarakat pada suatu zaman dan tempat tertentu, jadi ijtihad merupakan sumber dinamik internal Islam dalam menghadapi dinamik eksternal di dalam masyarakat. Dengan prinsip inilah fleksibilitas hukum Islam bisa diterapkan, sehingga Islam menjadi ajaran yang selalu respek dan adaptif dengan dinamika sosio kultural masyarakat global. Oleh karena itu maka Natsir sebagaimana tokoh modernis yang lain berusaha untuk melunakkan syarat-syarat ijtihad dalam urusan-urusan keduniaan, bukan saja terbatas kepada kaum alim ulama, tetapi juga kaum intelektual dan pemimpin-pemimpin yang dipercayai oleh rakyatnya, sebab permasalahan manusia yang demikian kompleks dan selalu berkembang dari waktu ke waktu tidak mungkin diselesaikan tanpa profesionalisme dalam penanganannya. Fenomena semacam ini sebenarnya sudah diantisipasi oleh rasulullah dengan menyerahkan urusan-urusan keduniaan kepada para sahabat untuk menanganinya. Pemikiran Natsir semacam ini

menyebabkan ia, menurut sebagian ahli, masuk dalam kategori tokoh yang cenderung bercorak *modernisme politik Islam*.

Basis politik Islam menurut Natsir adalah tauhid. Sejauh dan seluas apapun polarisasi ide doktrin politis tidak boleh bertentangan dengan konsep tauhid ini. Tauhid menurut Natsir ibarat sebilah pisau yang bermata dua. Pada satu sisi menegaskan keesaan Allah sebagai satu-satunya dzat yang dipertuhankan manusia, sementara disisi lainnya berisi penekanan kepada kesatuan universal umat manusia sebagai umat yang satu, berdasarkan persamaan, keadilan, toleransi dan kesabaran. Negara dalam perspektif ajaran tauhid tidak lebih dari sekedar alat untuk menjamin dilaksanakannya syariat Allah atas manusia. ✓

Mengenai hubungan antara doktrin yang termaktub dalam al Qur'an dan sunnah nabi dengan pembentukan lembaga-lembaga politik seperti negara dan badan-badan yang menjadi strukturnya, Natsir tidaklah melihat Islam sebagai *al dīn wa al daulah* (agama dan negara) secara sekaligus, Natsir tampaknya mengikuti pandangan Ibnu Taimiyah yang melihat *negara* sebagai sesuatu yang *perlu* bagi menegakkan suruhan-suruhan agama, tetapi eksistensinya sebagai *alat* belaka, dan bukannya lembaga itu sendiri (Yusril, 1995 : 135)

“Negara bagi kita, bukan tujuan, tetapi alat. Urusan kenegaraan pada pokoknya dan pada dasarnya adalah satu bagian yang tak dapat dipisahkan, satu *integreerend dell* dari Islam....” (Natsir, 1973 : 442)

Dalam menjalankan fungsinya sebuah negara tidak harus mempunyai bentuk tertentu. Sekalipun demikian Natsir memang memiliki kecenderungan mereduksi bentuk demokrasi liberal yang berlaku di Indonesia saat itu. Penafsiran demokrasi Islam menurutnya tidak ubahnya seperti pelaksanaan demokrasi di barat. Perbedaan pokoknya adalah bahwa ide yang menjadi basis sekaligus tujuan

demokrasi ini tetap berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, atau dengan kata lain demokrasi yang *theistic democracy*.

Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis ingin meneliti lebih lanjut pemikiran politik Mohammad Natsir, khususnya ide-ide briliannya tentang konsep modernisme politik Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala pemikiran Islam, khususnya dalam bidang politik dan aplikasinya dalam kehidupan bernegara, sekaligus semakin memantapkan posisi universalitas Islam sebagai agama *rahmatan li al 'ālamīn*.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemikiran politik Mohammad Natsir ?
2. Hal apa saja yang mempengaruhi pemikiran politiknya ?
3. Bagaimana sistem ekonomi negara Islam menurut Natsir ?
4. Bagaimana pemikiran Natsir tentang kedudukan Islam sebagai Idiologi Bangsa ?
5. Apakah pemikiran Natsir terhadap Organisasi Islam Internasional ?
6. Apa saja kebijaksanaan Natsir sebagai perdana menteri terhadap upaya ke arah pembentukan negara Islam.
7. Faktor-faktor apasaja yang membedakan pemikiran Islam tradisional dan pemikiran Islam modern.

C. Pembatasan Masalah

Perlu ditegaskan disini bahwa tulisan ini hanya membahas dan mengkaji pemikiran-pemikiran Mohammad Natsir dalam bidang politik yang tertuang dalam karya-karya tulisnya dan mengesampingkan pemikiran-pemikiran diluar itu.

D. Perumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Deskripsi pemikiran politik Islam Mohammad Natsir yang meliputi :

- a. Bagaimana kedudukan politik menurut Islam
- b. Bagaimana bentuk negara Islam
- c. Bagaimana hak asasi manusia dalam negara Islam
- d. Bagaimana hubungan internasional negeri negara Islam

2. Hal-hal yang melatarbelakangi pemikiran Mohammad Natsir

E. Tujuan Studi

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, studi ini bertujuan :

1. Untuk menemukan bentuk transparan dari pemikiran politik Mohammad Natsir, yang meliputi :
 - a. Kedudukan politik dalam Islam
 - b. Bentuk negara Islam

- c. Hak asasi manusia menurut Islam
 - d. Politik hubungan internasional negara Islam
2. Untuk mencari sebab-sebab yang melatarbelakangi pemikiran politik Mohamad Natsir dan mengkajinya dalam tinjauan perspektif doktrin Islam

F. Kegunaan Studi

Hasil studi ini diharapkan sekurang-kurangnya untuk :

1. Dijadikan bahan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan politik Islam
2. Digunakan sebagai perbandingan dalam usaha merumuskan konsep politik Islam yang adaptif, proporsional, dan fungsional

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data dicari dengan mengidentifisir buku-buku tentang politik. Isi dari buku-buku bersangkutan direkam dalam sebuah kartu (semacam kartu katalog) yang masing-masing kartu mewakili satu judul buku dan didalamnya ditulis nomor panggil buku, pengarang, judul buku, pokok bahasan, dan halaman. Metode ini digunakan dengan tujuan mempermudah penemuan data-data dalam buku bersangkutan. Contoh bentuk kartu :

297
NAT Natsir, Mohammad, <i>Capita Selecta</i>
c - Agama dan Negara, hlm. 420
- Demokrasi, hlm. 452
- dst.

2. Data Yang Dihimpun

Secara global data yang berhasil dihimpun dalam studi ini meliputi :

1. Tulisan Natsir tentang hubungan antara negara dengan politik
2. Tulisan Natsir tentang kedudukan politik dalam Islam
3. Tulisan Natsir tentang sejarah kebudayaan Islam
4. Tulisan Natsir tentang hak asasi manusia
5. Tulisan Natsir tentang Islam dan Kristen di Indonesia dan lain-lain

3. Sumber data

Data-data tersebut diperoleh dari karya-karya tulis Mohammad Natsir,

antara lain :

1. *Capita Selecta*, Mohammad Natsir
2. *Kebudayaan Islam dalam Perspektif Sejarah*, Mohammad Natsir
3. *Agama dan Negara : dalam perspektif Islam*, Mohammad Natsir
4. *Fiqhud Dakwah*, Mohammad Natsir
5. *Islam dan Kristen di Indonesia*, Mohammad Natsir

4. Analisa Data

Data-data yang berhasil dihimpun berkenaan dengan pemikiran Mohammad Natsir tentang politik, baik itu yang berkenaan dengan materi penelitian maupun hal-hal yang menjadi latar belakang pemikirannya dideskripsikan, kemudian dianalisa sehingga terwujud penelitian *deskriptif analitic*

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dilakukan dengan penguraian bab demi bab. Dari bab kemudian dipecah menjadi sub bab. Untuk lebih jelasnya, sistematika pembahasan dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab Pertama berisi Pendahuluan, merupakan gambaran umum penulisan skripsi yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan studi, kegunaan studi, metode penelitian yang terdiri dari : jenis penelitian, data yang dihimpun, sumber data, dan analisa data, serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Konsep Ajaran Islam tentang Politik (Landasan Teori) meliputi : pengertian politik, ruang lingkup politik Islam, antara lain berisi kedudukan politik dalam Islam dan prinsip-prinsip kehidupan bernegara..

Bab Ketiga, berisi transparansi pemikiran politik Mohammad Natsir yang meliputi : Riwayat hidup, situasi sosial politik dan karya-karyanya, kedudukan politik dalam perspektif Islam, bentuk negara menurut Islam, hak asasi manusia menurut Islam , dan hubungan internasional negara Islam.

Bab Keempat, berisi analisa terhadap pemikiran politik Mohammad Natsir yang meliputi : visi politik, tendensi pemikiran, serta karakteristik pemikirannya.

Bab Kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.